

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Pertumbuhan PAD dan Ketergantungan Transfer Fiskal Daerah di NTB Analisis Panel Kabupaten/Kota 2012–2023

Fathurrahman^{1*)}

¹Universitas Islam Al Azhar, Jl. Unizar No.20 Kelurahan Turida, Kecamatan
Sandubaya, Kota Mataram-NTB (83232)
[Email: fathurrahmanmaks@gmail.com](mailto:fathurrahmanmaks@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:

Send 10/10/2024

Received 13/11/2024

Accepted 25/12/2024

Abstract

This study aims to analyse the relationship between the growth of Local Own-Source Revenue (PAD) and dependence on fiscal transfers in 10 regencies and cities in West Nusa Tenggara Province during the period 2012–2023. The main issue examined is whether the increase in PAD truly reflects a strengthening of fiscal autonomy or merely indicates nominal growth that has not altered the dominance of central government transfers. The study employs a descriptive-analytical quantitative approach based on panel data comprising 120 region-year observations. Secondary data is sourced from Local Government Financial Reports and focuses on four revenue components: PAD, Revenue-Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds. The analysis was conducted by calculating growth rates, the compound annual growth rate (CAGR), the proportion of PAD, the transfer dependency ratio, regional fiscal typology, and fixed-effect estimates as supporting tests. The research findings indicate that aggregate PAD increased from Rp0.57 trillion in 2012 to Rp2.37 trillion in 2023, with a CAGR of 13.70% per annum. However, in 2023, PAD accounted for only 16.4% of the main revenue structure, whilst central government transfers still amounted to 83.6%. The fixed-effects estimation revealed a PAD growth coefficient of -0.066 with a p -value of 0.001 , indicating a significant negative relationship between PAD growth and dependence on central government transfers, although the effect is limited. The fiscal typology identified the City of Mataram and North Lombok Regency as regions showing relative fiscal improvement, whilst several other regions remained in a state of structural dependence. This study emphasises that fiscal autonomy must be assessed based on changes in revenue structure, rather than solely on PAD growth. The contribution of this research lies in distinguishing between nominal PAD growth and structural fiscal autonomy; consequently, the findings can serve as a basis for formulating policies to enhance PAD that are fairer, more productive and more sustainable for local governments in West Nusa Tenggara (NTB).

Keywords: Local Own-Source Revenue; Fiscal Transfers; Fiscal Autonomy; Fiscal Decentralisation; Panel Data; NTB

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan transfer fiskal pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2012–2023. Masalah utama yang dikaji adalah apakah peningkatan PAD benar-benar mencerminkan penguatan kemandirian fiskal atau hanya menunjukkan pertumbuhan nominal yang belum mengubah dominasi transfer pusat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitis berbasis data panel dengan 120 observasi daerah-tahun. Data sekunder bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan difokuskan pada empat komponen pendapatan, yaitu PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Analisis dilakukan melalui perhitungan pertumbuhan, compound annual growth rate, proporsi PAD, rasio ketergantungan transfer, tipologi fiskal daerah, serta estimasi fixed effect sebagai uji pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD agregat meningkat dari Rp0,57 triliun pada 2012 menjadi Rp2,37 triliun pada 2023, dengan CAGR sebesar 13,70% per tahun. Namun, pada 2023 PAD hanya menyumbang 16,4% dari struktur pendapatan utama, sedangkan transfer pusat masih mencapai 83,6%. Estimasi fixed effect menunjukkan koefisien pertumbuhan PAD sebesar -0,066 dengan p-value 0,001, yang mengindikasikan hubungan negatif signifikan antara pertumbuhan PAD dan ketergantungan transfer, meskipun pengaruhnya terbatas. Tipologi fiskal memperlihatkan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah dengan perbaikan fiskal relatif, sementara beberapa daerah lain tetap berada dalam ketergantungan struktural. Penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal perlu dinilai dari perubahan struktur pendapatan, bukan semata pertumbuhan PAD. Kontribusi penelitian terletak pada pembedaan antara pertumbuhan nominal PAD dan kemandirian fiskal struktural, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan PAD yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah NTB.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah; Transfer Fiskal; Kemandirian Fiskal; Desentralisasi Fiskal; Data Panel; NTB*

**)Penulis Korespondensi*

E-mail : fathurrahmanmaks@gmail.com

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal pada dasarnya bukan sekadar mekanisme administratif pembagian sumber pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah, melainkan desain kelembagaan yang menentukan kemampuan daerah membiayai kewenangan, menetapkan prioritas pembangunan, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan kebutuhan warga. Secara teoritis, desentralisasi dipandang mampu memperkuat efisiensi alokasi, akuntabilitas, dan responsivitas kebijakan karena pemerintah daerah diasumsikan lebih memahami kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Namun, manfaat tersebut tidak bekerja secara otomatis. Faguet (2014) menegaskan bahwa kekuatan utama desentralisasi terletak pada kemampuannya memperbaiki akuntabilitas dan responsivitas pemerintahan, tetapi keberhasilan itu mensyaratkan kapasitas fiskal, keleluasaan anggaran, dan insentif kelembagaan yang sehat. Karena itu, kemandirian fiskal tidak cukup dibaca dari besarnya dana yang diterima daerah, melainkan dari kemampuan daerah membangun ruang fiskal yang produktif, berkelanjutan, dan berpihak pada pelayanan publik.

Dalam konteks 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2012–2023, persoalan tersebut tampak melalui ketegangan antara pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominasi transfer pusat. Data awal menunjukkan bahwa PAD memang mengalami pertumbuhan rata-rata yang relatif tinggi, tetapi pada 2023 kontribusi PAD agregat terhadap total PAD, DBH, DAU, dan DAK baru mencapai 16,4%, sedangkan transfer pusat masih mencapai 83,6%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kenaikan PAD secara nominal belum tentu mencerminkan kemandirian fiskal secara struktural. Daerah dapat terlihat bertumbuh dari sisi angka, tetapi tetap memiliki ruang gerak fiskal yang terbatas apabila pembiayaan pembangunan masih sangat ditentukan oleh DBH, DAU, dan DAK. Dengan demikian, isu pokok penelitian ini bukan hanya apakah PAD meningkat, melainkan apakah peningkatan tersebut cukup kuat untuk mengubah struktur ketergantungan fiskal daerah.

Kajian empiris mengenai desentralisasi fiskal Indonesia menunjukkan bahwa transfer antar Pemerintahan tidak bersifat netral, sebab ia dapat membentuk perilaku fiskal daerah. Lewis (2013) menunjukkan bahwa transfer fiskal berpengaruh terhadap belanja modal daerah, sementara Lewis dan Smoke (2017) menegaskan adanya insentif tertentu dalam sistem transfer Indonesia yang dapat memengaruhi perilaku penerimaan, belanja, dan tabungan pemerintah daerah. Akita, Riadi, dan Rizal (2021), Fatoni (2020) menunjukkan bahwa disparitas fiskal antar daerah masih tinggi, terutama karena perbedaan basis ekonomi, sumber daya alam, dan kapasitas penerimaan lokal. Artinya, ketergantungan transfer bukan hanya persoalan komposisi pendapatan, tetapi juga menyangkut kualitas insentif: apakah transfer mendorong daerah memperluas basis PAD secara sehat, atau justru membuat daerah merasa aman dalam pola fiskal yang bergantung pada pusat.

Celah utama penelitian terdahulu terletak pada kecenderungan menyamakan pertumbuhan PAD dengan kemandirian fiskal, padahal daerah dapat mengalami kenaikan PAD yang tinggi tetapi tetap berada dalam struktur ketergantungan apabila transfer pusat masih mendominasi pendapatan. Studi Lewis (2013) menunjukkan bahwa transfer memengaruhi kapasitas belanja daerah, sedangkan Lewis dan Smoke (2017) menegaskan bahwa transfer antarpemerintahan membentuk insentif dan respons fiskal daerah. Akita et al. (2021) memperlihatkan bahwa disparitas fiskal antardaerah tetap kuat karena perbedaan basis ekonomi dan kapasitas penerimaan, sementara Qibthiyyah (2017) menekankan bahwa struktur pendapatan daerah berkaitan dengan ketimpangan intraprovinci. Pada tingkat

nasional, Fadli (2016) juga menunjukkan bahwa dana perimbangan masih berhubungan dengan persoalan disparitas wilayah, terutama ketika kapasitas fiskal daerah belum berkembang seimbang. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan tipologi fiskal berbasis kombinasi pertumbuhan PAD, *share* PAD, dan rasio ketergantungan transfer. Kebaruannya terletak pada perbedaan eksplisit antara pertumbuhan nominal PAD dan kemandirian fiskal struktural. Dengan pendekatan ini, daerah tidak dinilai mandiri hanya karena PAD meningkat, tetapi karena PAD mampu menggeser posisi fiskalnya terhadap transfer pusat. Kerangka ini lebih manusiawi secara kebijakan karena tidak sekadar menuntut daerah menaikkan pungutan, tetapi mendorong pembacaan yang lebih adil atas kapasitas ekonomi lokal, kualitas administrasi pendapatan, dan kebutuhan pelayanan publik masyarakat (Qibthiyyah, 2017; Fadli, 2016; Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., S Farida, D. N. 2019).

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana pola pertumbuhan PAD, DBH, DAU, dan DAK pada 10 kabupaten/kota di NTB selama 2012–2023; apakah pertumbuhan PAD mampu menurunkan rasio ketergantungan terhadap transfer pusat; dan bagaimana tipologi fiskal daerah jika dilihat dari kombinasi pertumbuhan PAD dan tingkat ketergantungan transfer. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada empat komponen pendapatan, yaitu PAD, DBH, DAU, dan DAK, agar analisis tetap fokus pada struktur penerimaan yang paling relevan untuk membaca hubungan antara kapasitas lokal dan dominasi transfer. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai seluruh komponen APBD, efektivitas belanja, atau dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, fokus tersebut tetap penting karena struktur pendapatan merupakan fondasi awal yang menentukan seberapa jauh daerah mampu menyusun kebijakan pembangunan secara mandiri, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perbedaan eksplisit antara pertumbuhan PAD dan kemandirian fiskal struktural. PAD tidak diperlakukan sebagai tanda otomatis kemandirian, tetapi sebagai indikator kapasitas penerimaan lokal yang harus dibaca bersama proporsi transfer pusat. Dengan pendekatan ini, daerah yang PAD-nya tumbuh tinggi tetapi tetap bergantung pada DAU dan DAK tidak langsung dikategorikan mandiri; sebaliknya, daerah dengan pertumbuhan PAD moderat tetapi mampu meningkatkan proporsi PAD secara konsisten dapat dibaca sedang memperbaiki posisi fiskalnya. Penyusunan tipologi fiskal berbasis kombinasi pertumbuhan PAD dan ketergantungan transfer diharapkan memberi diagnosis kebijakan yang lebih tajam bagi pemerintah daerah dan pusat. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian desentralisasi fiskal dengan menegaskan bahwa kemandirian tidak lahir dari klaim administratif, melainkan dari perubahan struktur fiskal yang nyata. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi strategi peningkatan PAD yang tidak membebani masyarakat, tetapi bertumpu pada penguatan basis ekonomi lokal, perbaikan administrasi pendapatan, kualitas belanja produktif, dan desain transfer yang lebih mendorong kemandirian daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitis berbasis data panel untuk membaca pertumbuhan PAD, struktur transfer, dan posisi fiskal 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2012–2023 secara sistematis, terukur, dan dapat dibandingkan antarwilayah maupun antarwaktu. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter masalah penelitian yang tidak cukup dijawab melalui narasi normatif, tetapi membutuhkan pengukuran numerik atas PAD, DBH, DAU, dan DAK, termasuk pertumbuhan, proporsi, serta rasio ketergantungan transfer. Namun, angka dalam

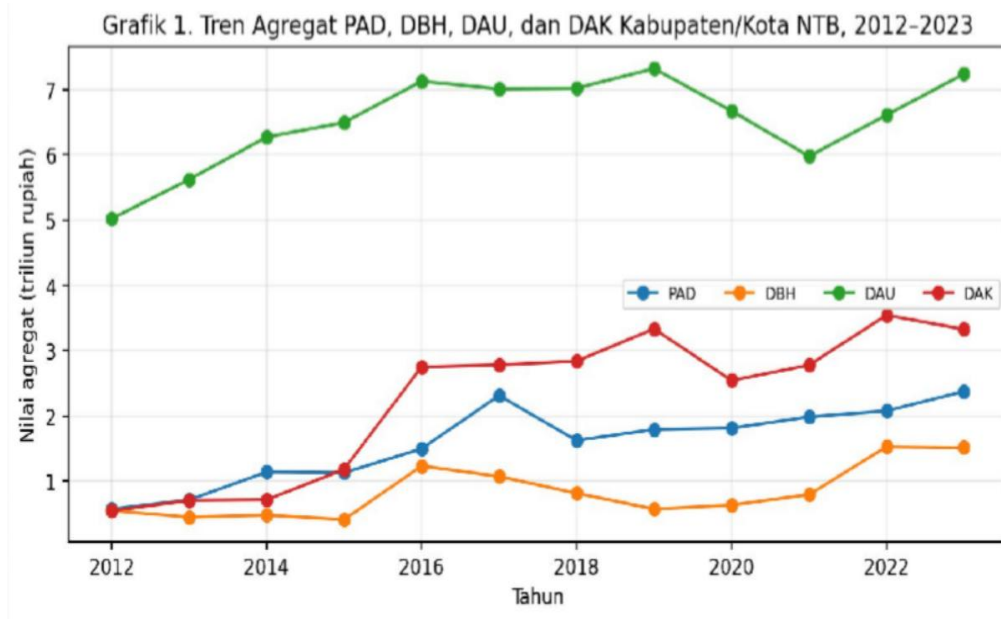
penelitian ini tidak diperlakukan sebagai data administratif yang netral, melainkan sebagai gejala fiskal yang perlu ditafsirkan secara kebijakan: apakah pertumbuhan PAD benar-benar memperkuat kemandirian fiskal struktural, atau hanya menunjukkan kenaikan nominal yang tetap berada dalam dominasi transfer pusat. Kerangka ini sejalan dengan Faguet (2014), yang menempatkan desentralisasi sebagai mekanisme untuk memperkuat akuntabilitas dan responsivitas lokal, tetapi dalam konteks Indonesia perlu dibaca bersama temuan Lewis (2013) serta Lewis dan Smoke (2017), bahwa transfer antarpemerintahan tidak hanya membiayai daerah, tetapi juga membentuk insentif, perilaku belanja, dan respons fiskal pemerintah daerah. Unit analisis penelitian mencakup 10 pemerintah kabupaten/kota di NTB dengan 120 observasi daerah-tahun, sedangkan objek penelitian difokuskan pada struktur pendapatan daerah melalui PAD sebagai representasi kapasitas lokal serta DBH, DAU, dan DAK sebagai representasi transfer pusat. Penggunaan data sekunder LKPD 2012–2023 memungkinkan penelitian ini menilai variasi fiskal secara lebih adil, karena daerah tidak langsung dianggap mandiri hanya karena PAD meningkat, melainkan dinilai berdasarkan kemampuan PAD mengubah posisinya terhadap transfer pusat. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menghasilkan pemetaan statistik, tetapi juga menjadi dasar pengembangan tipologi fiskal daerah yang lebih manusiawi secara kebijakan: tidak sekadar menuntut daerah menaikkan pungutan, melainkan membantu pemerintah memahami kapasitas ekonomi lokal, kualitas administrasi pendapatan, dan kebutuhan pelayanan publik masyarakat. Relevansi pendekatan ini diperkuat oleh Akita et al. (2021), yang menunjukkan bahwa disparitas fiskal Indonesia masih terkait dengan perbedaan kapasitas penerimaan dan efektivitas dana alokasi umum, serta Qibthiyyah (2017), Fathurrahman (2023) dan Fadli (2016), yang menegaskan pentingnya membaca struktur pendapatan dan transfer dalam kaitannya dengan ketimpangan fiskal dan pembangunan daerah.

Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk lembar dokumentasi data fiskal dan matriks analisis indikator. Lembar dokumentasi digunakan untuk mencatat nilai PAD, DBH, DAU, dan DAK setiap kabupaten/kota selama 2012–2023, sedangkan matriks analisis digunakan untuk menghitung total PAD-transfer, pertumbuhan tahunan, compound annual growth rate atau CAGR, PAD share, DBH share, DAU share, DAK share, dan transfer dependency ratio.

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Secara agregat, total PAD 10 kabupaten/kota NTB meningkat dari Rp 0.57 triliun pada 2012 menjadi Rp2.37 triliun pada 2023. DBH meningkat dari Rp0.55 triliun menjadi Rp1.51 triliun; DAU meningkat dari Rp5.02 triliun menjadi Rp7.24 triliun; dan DAK meningkat dari Rp0.55 triliun menjadi Rp3.33 triliun. Secara nominal, seluruh komponen meningkat, tetapi pola pertumbuhannya tidak sama. CAGR agregat menunjukkan DAK sebagai komponen dengan laju pertumbuhan tertinggi, yaitu 17.85% per tahun. PAD tumbuh 13.82% per tahun, DBH 9.73% per tahun, sedangkan DAU hanya 3.38% per tahun. Temuan ini menunjukkan dua hal. Pertama, PAD memang bertumbuh lebih cepat daripada DAU. Kedua, DAK tumbuh lebih cepat daripada PAD sehingga peningkatan transfer bersyarat tetap menjadi faktor penting dalam struktur pendapatan daerah.

Grafik 1.1 memperlihatkan bahwa DAU tetap menjadi komponen terbesar sepanjang periode penelitian. Meskipun pertumbuhannya paling lambat, nilai nominal DAU berada jauh di atas PAD, DBH, dan DAK. Ini menandakan bahwa struktur fiskal daerah di NTB tidak hanya ditentukan oleh laju pertumbuhan, tetapi juga oleh posisi awal dan skala nominal masing-masing komponen. PAD dapat tumbuh cepat, tetapi karena berangkat dari basis yang jauh lebih rendah, kontribusinya terhadap struktur pendapatan tidak serta-merta mendekati DAU.



Grafik 1. Tren Agregat PAD, DBH, DAU, dan DAK Kabupaten/Kota NTB, 2012-2023

Sumber: Diolah dari LKPD kabupaten/kota NTB, 2012-2023.

Data pada tabel 1.2 dibawah memberikan gambaran awal mengenai dinamika kapasitas fiskal 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2012-2023, khususnya dalam hubungan antara pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat. Secara umum, seluruh daerah menunjukkan pertumbuhan PAD yang positif, bahkan sebagian daerah mencatat CAGR PAD yang cukup tinggi, seperti Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram. Namun, peningkatan PAD tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan struktur pendapatan yang kuat, karena pada tahun 2023 sebagian besar daerah masih memiliki proporsi transfer di atas 80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD secara nominal memang mencerminkan adanya perbaikan kapasitas penerimaan lokal, tetapi belum otomatis menandakan kemandirian fiskal yang kokoh. Perbedaan PAD Share 2023 dan perubahan PAD Share 2012-2023 juga memperlihatkan variasi posisi fiskal antardaerah: Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara tampak lebih progresif dalam memperbesar ruang PAD, sementara Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Sumbawa Barat masih berada dalam struktur ketergantungan transfer yang sangat tinggi. Dengan demikian, data ini perlu dibaca bukan hanya sebagai deretan angka pertumbuhan, melainkan sebagai pintu masuk untuk menilai apakah perkembangan PAD benar-benar menggeser ketergantungan fiskal daerah atau masih berhenti pada pertumbuhan yang bersifat terbatas secara struktural.

Tabel 1. Pertumbuhan dan Struktur Fiskal Kabupaten/Kota NTB, 2012-2023

Daerah	CAGR PAD (%)	CAGR DBH (%)	CAGR DAU (%)	CAGR DAK (%)	PAD Share 2023 (%)	Transfer 2023 (%)	Δ PAD Share 2012-2023 (p.p.)
Kabupaten Bima	12.56	3.52	3.56	19.75	10.08	89.92	4.39

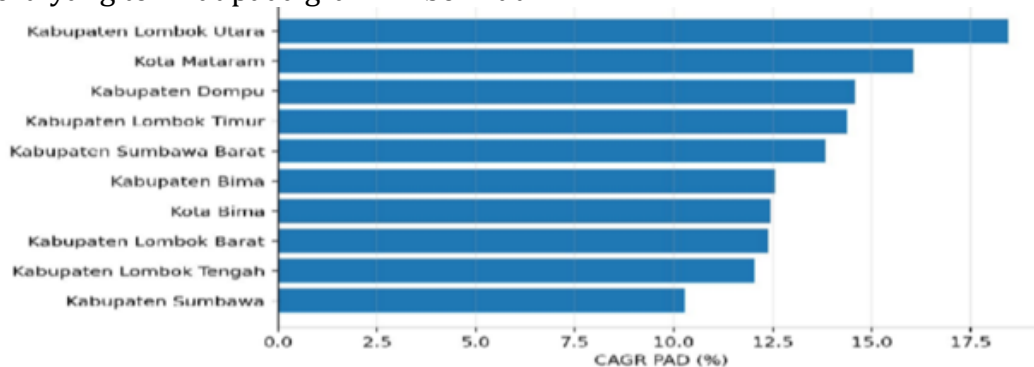
Kabupaten Dompu	14.58	6.09	2.76	16.68	11.90	88.10	6.86
Kabupaten Lombok Barat	12.40	3.61	3.38	16.58	22.34	77.66	9.76
Kabupaten Lombok Tengah	12.05	5.79	3.69	19.24	14.02	85.98	5.49
Kabupaten Lombok Timur	14.39	3.39	3.37	19.20	16.00	84.00	8.07
Kabupaten Lombok Utara	18.45	5.57	3.53	15.51	25.88	74.12	16.61
Kabupaten Sumbawa	10.29	15.18	3.49	17.67	11.01	88.99	2.92
Kabupaten Sumbawa Barat	13.84	17.59	3.75	15.88	11.14	88.86	3.00
Kota Bima	12.44	5.26	2.97	10.54	7.52	92.48	4.11
Kota Mataram	16.06	6.79	3.07	21.01	32.92	67.08	17.96

Sumber: Diolah dari LKPD kabupaten/kota NTB, 2012–2023.

Temuan tabel tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan PAD kabupaten/kota di NTB selama 2012–2023 tidak dapat langsung disamakan dengan penguatan kemandirian fiskal, sebab sebagian besar daerah masih menunjukkan tingkat ketergantungan transfer di atas 80% pada 2023. Secara teoritis, hal ini memperkuat argumen bahwa desentralisasi fiskal tidak cukup dinilai dari kenaikan penerimaan lokal, tetapi harus dibaca dari kemampuan PAD memperbesar ruang diskresi fiskal daerah dan mengurangi dominasi DBH, DAU, serta DAK dalam struktur pendapatan. Temuan ini sejalan dengan Mahi (2011), yang menegaskan bahwa PAD di banyak daerah Indonesia belum cukup kuat menjadi basis pembiayaan lokal yang mandiri, serta Kusumadewi dan Rahman (2007), yang menunjukkan adanya gejala *flypaper effect* ketika belanja daerah lebih responsif terhadap transfer pusat daripada terhadap PAD. Dengan demikian, kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada perbedaan eksplisit antara “PAD bertumbuh” dan “kemandirian fiskal struktural”, sedangkan kontribusi praktisnya terletak pada penyediaan alat baca kebijakan yang lebih adil melalui kombinasi CAGR PAD, *PAD share*, tingkat transfer, dan perubahan *PAD share* 2012–2023. Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara dapat dibaca sebagai daerah yang mulai memperbesar ruang PAD, sementara Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Sumbawa Barat masih menghadapi ketergantungan transfer yang tinggi. Sintesis ini memperkuat pandangan Ginting et al. (2019) bahwa dana perimbangan perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas produktif daerah.

Pertumbuhan PAD antar Daerah

Pertumbuhan PAD tidak merata antardaerah. Kabupaten Lombok Utara mencatat CAGR PAD tertinggi sebesar 18.45%, diikuti Kota Mataram sebesar 16.06%. Sementara itu, Kabupaten Sumbawa mencatat CAGR PAD terendah sebesar 10.29%. Perbedaan ini mengindikasikan variasi basis ekonomi, kapasitas administrasi pendapatan, dan kemungkinan perbedaan strategi intensifikasi serta ekstensifikasi PAD. Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara menarik untuk dicermati karena keduanya tidak hanya memiliki pertumbuhan PAD relatif tinggi, tetapi juga mencatat peningkatan PAD share yang besar. Kota Mataram mengalami kenaikan PAD share sekitar 18,0 poin persentase, sedangkan Kabupaten Lombok Utara naik sekitar 16,6 poin persentase. Artinya, pada kedua daerah tersebut pertumbuhan PAD lebih dekat dengan perubahan struktur fiskal. Namun, posisi ini belum dapat disamakan dengan kemandirian penuh karena transfer tetap menjadi komponen mayoritas. Sebaliknya, beberapa daerah memiliki pertumbuhan PAD yang cukup baik tetapi PAD share 2023 masih rendah. Kota Bima, misalnya, memiliki PAD share hanya sekitar 7,5% pada 2023, meskipun PAD bertumbuh rata-rata 12,4% per tahun. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD dari basis yang kecil belum cukup untuk menurunkan dominasi transfer. Temuan ini memperkuat argumen utama penelitian: pertumbuhan PAD dan kemandirian fiskal perlu dibedakan secara konseptual dan empiris seperti yang terlihat pada grafik. 2 berikut.



Grafik 2. CAGR PAD kabupaten/ Kota di NTB 2012-2023

Sumber: Diolah dari LKPD kabupaten/kota NTB, 2012–2023.

Temuan grafik CAGR PAD 2012–2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD kabupaten/kota di NTB berlangsung positif, tetapi tidak merata; Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram tampil sebagai daerah dengan akselerasi penerimaan lokal paling kuat, sementara Kabupaten Sumbawa berada pada posisi terendah meskipun tetap tumbuh di atas 10% per tahun. Secara teoritis, pola ini memperkuat pandangan bahwa kapasitas fiskal lokal tidak hanya ditentukan oleh status otonomi daerah, tetapi oleh kemampuan daerah menggerakkan basis ekonomi, memperbaiki administrasi pendapatan, dan mengelola potensi lokal secara berkelanjutan; Mahi (2011) menegaskan bahwa peningkatan kewenangan fiskal daerah perlu diikuti kemampuan mobilisasi pendapatan asli agar desentralisasi tidak berhenti pada pelimpahan administratif semata. Namun, tingginya CAGR PAD belum dapat langsung dimaknai sebagai kemandirian fiskal, sebab penelitian mengenai flypaper effect menunjukkan bahwa belanja daerah di Indonesia masih kerap lebih responsif terhadap transfer pusat daripada PAD, sehingga pertumbuhan PAD perlu diuji bersama struktur transfer dan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (Fathurrahman, dkk 2023). Dengan demikian, kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperjelas bahwa pertumbuhan PAD merupakan indikator awal kapasitas lokal, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan kemandirian fiskal struktural; sementara kontribusi praktisnya adalah menyediakan dasar klasifikasi yang lebih adil bagi kebijakan daerah. Daerah dengan CAGR PAD tinggi seperti Lombok Utara dan Kota Mataram perlu diarahkan untuk mengonversi pertumbuhan

tersebut menjadi peningkatan PAD share yang stabil, sedangkan daerah dengan pertumbuhan lebih rendah membutuhkan strategi penguatan basis ekonomi lokal, digitalisasi administrasi pendapatan, dan belanja produktif, bukan sekadar peningkatan pungutan kepada masyarakat. Sintesis ini sejalan dengan Ginting et al. (2019), yang menunjukkan bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan berbeda antar-kluster daerah, serta Andriani dan Wahid (2018), yang menegaskan pentingnya membaca PAD dan dana perimbangan secara bersamaan dalam menilai kemandirian fiskal.

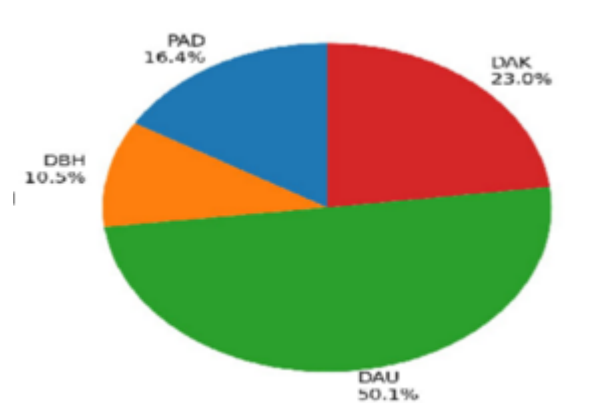
Temuan pertumbuhan PAD kabupaten/kota di NTB perlu dibaca secara hati-hati karena peningkatan penerimaan lokal tidak otomatis menunjukkan kemandirian fiskal struktural. Literatur nasional mutakhir menunjukkan bahwa PAD dan transfer pusat harus dianalisis secara simultan karena keduanya sama-sama membentuk kinerja dan ruang fiskal pemerintah daerah. Ginting et al. (2019) menegaskan bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah berbeda antar-kluster, sedangkan Mubarok et al. (2022) menunjukkan bahwa intergovernmental revenue dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan tersebut sejalan dengan Afrizal dan Khoirunurrofik (2022), yang memperlihatkan masih relevannya fenomena *flypaper effect* dalam konteks fiskal daerah Indonesia. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada upaya membedakan pertumbuhan PAD secara nominal dari kemandirian fiskal secara struktural, sehingga kebijakan peningkatan PAD tidak semata diarahkan pada penambahan pungutan, tetapi pada penguatan basis ekonomi lokal, perbaikan administrasi pendapatan, dan desain transfer yang mendorong daerah semakin berdaya.

Struktur Pendapatan dan Dominasi Dana Transfer

Struktur pendapatan agregat tahun 2023 memperlihatkan bahwa PAD belum menjadi sumber utama pembiayaan daerah. PAD hanya mencakup 16.4% dari total PAD, DBH, DAU, dan DAK. Sementara itu, DAU mencakup 50.1%, DAK 23.0%, dan DBH 10.5%. Dengan demikian, ketergantungan terhadap transfer masih sangat tinggi, terutama pada DAU sebagai transfer umum dan DAK sebagai transfer berbasis prioritas kegiatan.

Gambar 1 memperjelas bahwa persoalan fiskal daerah di NTB bukan semata-mata kelemahan PAD, melainkan ketidakseimbangan struktural antara sumber pendapatan lokal dan transfer pusat. DAU tetap menjadi penyangga utama fiskal daerah. DAK yang meningkat cepat juga memperlihatkan kuatnya peran agenda pusat dalam membiayai kegiatan daerah. Dalam perspektif transfer antarpemerintahan, kondisi ini dapat dipahami sebagai mekanisme pemerataan dan dukungan prioritas nasional. Namun, dari perspektif otonomi fiskal, dominasi transfer menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih bergantung pada kebijakan pusat.

Temuan ini sejalan dengan argumentasi Lewis dan Smoke (2017) bahwa sistem transfer perlu dinilai berdasarkan respons empiris daerah, bukan hanya asumsi teoretis. Di NTB, transfer tidak dapat disebut semata-mata sebagai insentif negatif, karena transfer juga menjadi instrumen penting untuk menjaga layanan publik. Namun, dominasi transfer yang persisten dapat membatasi insentif dan ruang daerah untuk membangun basis PAD yang lebih kuat apabila tidak diimbangi reformasi administrasi pendapatan dan pengembangan ekonomi lokal. Agregat nya dapat terlihat pada gambar berikut:



Gambar. 1 Srtuktur Pendapatan Agregat Kab/Kota NTB Tahun 2023
Sumber: diolah dari LKPD Kab/Kota NTB 2012-2023

Komposisi pendapatan agregat kabupaten/kota di NTB tahun 2023 memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal masih menghadapi paradoks mendasar: daerah memiliki kewenangan otonom, tetapi ruang fiskalnya tetap sangat ditentukan oleh transfer pusat. Dominasi DAU sebesar 50,1%, disusul DAK 23,0% dan DBH 10,5%, menunjukkan bahwa 83,6% struktur pendapatan masih berasal dari transfer, sementara PAD baru mencapai 16,4%. Temuan ini sejalan dengan Mahi (2011) yang menegaskan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki PAD yang cukup signifikan untuk menopang belanja lokal secara mandiri. Selain itu, Ginting et al. (2019) menunjukkan bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah tidak bersifat seragam antar-kluster, sehingga ketergantungan transfer perlu dibaca secara kontekstual, bukan digeneralisasi secara nasional. Mubarok et al. (2022) juga menemukan bahwa *intergovernmental revenue* dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Afrizal dan Khoirunurrofik (2022) memperkuat relevansi isu *flypaper effect* dalam fiskal daerah Indonesia.

Dengan demikian, kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kemandirian fiskal tidak cukup diukur dari pertumbuhan PAD, tetapi harus dilihat dari posisi PAD dalam struktur pendapatan dan kemampuannya mengurangi dominasi transfer pusat. Secara praktis, temuan ini memberi arah kebijakan yang lebih manusiawi: peningkatan PAD tidak boleh hanya diterjemahkan sebagai penambahan pungutan kepada masyarakat, melainkan harus diarahkan pada penguatan basis ekonomi lokal, digitalisasi administrasi pendapatan, peningkatan kualitas layanan publik, dan desain transfer yang mendorong daerah berdaya secara bertahap. Nurhayati et al. (2022) menegaskan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah tertinggal, sehingga penguatan fiskal daerah perlu bertumpu pada produktivitas ekonomi lokal, bukan sekadar intensifikasi penerimaan administratif.

Pertumbuhan PAD Menurunkan Ketergantungan Transfer

Pertanyaan utama penelitian ini adalah apakah pertumbuhan PAD mampu menurunkan rasio ketergantungan transfer. Secara deskriptif, jawaban penelitian bersifat terbatas: pertumbuhan PAD berkontribusi terhadap peningkatan PAD share, tetapi belum cukup kuat untuk mengubah dominasi transfer secara keseluruhan. Semua daerah pada 2023 masih memiliki rasio transfer lebih dari 67%. Bahkan daerah dengan PAD share tertinggi, yaitu Kota Mataram, masih memiliki rasio transfer sekitar 67,1%. Daerah dengan PAD share terendah, Kota Bima, memiliki rasio transfer sekitar 92,5%.

Estimasi fixed effect memberikan indikasi bahwa pertumbuhan PAD tahunan berkorelasi negatif dengan rasio ketergantungan transfer. Koefisien PAD growth sebesar -0.066 dengan nilai p 0.001, setelah mengendalikan efek tetap daerah dan tahun. Artinya, secara statistik terdapat hubungan bahwa peningkatan PAD cenderung diikuti penurunan rasio transfer. Namun, hubungan ini harus dibaca hati-hati karena rasio transfer secara definisional bergerak berlawanan dengan PAD share dalam total empat komponen pendapatan yang dianalisis. Oleh karena itu, hasil model pendukung tidak dimaknai sebagai bukti kausal yang kuat, tetapi sebagai konfirmasi bahwa perubahan PAD memiliki hubungan struktural dengan komposisi pendapatan. Grafik 3. menunjukkan bahwa daerah dengan CAGR PAD tinggi tidak selalu memiliki rasio transfer yang rendah. Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram berada pada posisi relatif lebih baik karena memiliki pertumbuhan PAD tinggi dan ketergantungan transfer lebih rendah dibanding banyak

daerah lain. Namun, beberapa daerah lain tetap berada pada rasio transfer tinggi meskipun PAD bertumbuh. Ini memperlihatkan bahwa problem fiskal daerah bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi memastikan peningkatan tersebut lebih cepat dan lebih stabil daripada pertumbuhan transfer.



Grafik. 3 Pertumbuhan PAD dan Rasio Ketergantungan Transfer Kab/Kota NTB Tahun 2023

Sumber: Diolah dari LKPD Kab/Kota NTB Tahun 2012-2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap rasio ketergantungan transfer, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien PAD growth sebesar -0,066 dengan p-value 0,001. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan PAD cenderung diikuti oleh penurunan tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, meskipun besarnya pengaruh tersebut relatif terbatas. Nilai R-squared sebesar 0,879 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi ketergantungan transfer, terutama karena telah mengendalikan perbedaan karakteristik tetap antar daerah dan dinamika tahunan melalui efek tetap daerah dan efek tetap tahun. Dengan demikian, hasil ini memperkuat argumen bahwa pertumbuhan PAD memang berperan dalam menekan ketergantungan fiskal, tetapi kemandirian fiskal tetap perlu dibaca secara struktural karena perubahan PAD tidak bekerja dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi daerah, desain transfer pusat, dan kondisi fiskal tiap tahun.

Tabel. 2 Ringkasan Uji Fixed Effect: PAD Growth dan Rasio Ketergantungan Transfer

Komponen	Nilai
Koefisien PAD growth	-0.066
p-value	0.001
R-squared	0.879
Jumlah observasi	110
Efek tetap daerah	Ya
Efek tetap tahun	Ya

Tipologi Fiskal Daerah

Tipologi fiskal memperlihatkan bahwa Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara dapat dibaca sebagai daerah dengan perbaikan fiskal relatif. Keduanya memiliki pertumbuhan PAD di atas rata-rata dan rasio transfer lebih rendah dibanding rata-rata daerah. Namun, kategori ini bersifat relatif, bukan absolut. Keduanya tetap belum bebas dari ketergantungan transfer karena transfer masih menjadi mayoritas pendapatan. Daerah seperti Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Timur menunjukkan PAD bertumbuh relatif tinggi, tetapi rasio transfer masih berada pada tingkat tinggi. Posisi ini mengindikasikan adanya dinamika penerimaan lokal, tetapi belum cukup kuat untuk menggeser struktur fiskal. Strategi kebijakan untuk kelompok ini seharusnya tidak hanya mengejar kenaikan nominal PAD, tetapi memperluas basis pajak lokal, meningkatkan kualitas data wajib pajak, memperbaiki kepatuhan, dan menghubungkan kebijakan PAD dengan penguatan sektor ekonomi produktif.

Daerah dengan kategori ketergantungan struktural membutuhkan perhatian berbeda. Pada kelompok ini, pertumbuhan PAD relatif lebih rendah dan rasio transfer tetap tinggi. Kebijakan yang hanya mendorong target PAD tahunan berisiko menjadi administratif dan tidak menyentuh akar persoalan. Yang lebih dibutuhkan adalah reformasi kapasitas pendapatan, perbaikan administrasi pajak dan retribusi, serta strategi pembangunan ekonomi lokal yang memperluas basis penerimaan secara bertahap.

Tabel. 3 Tipologi Fiskal Kabupaten/Kota NTB

Daerah	CAGR PAD (%)	Transfer 2023 (%)	PAD Share 2023 (%)	Tipologi
Kabupaten Bima	12.56	89.92	10.08	Ketergantungan struktural
Kabupaten Dompu	14.58	88.10	11.90	PAD bertumbuh, transfer tetap tinggi
Kabupaten Lombok Barat	12.40	77.66	22.34	Transisi moderat
Kabupaten Lombok Tengah	12.05	85.98	14.02	Ketergantungan struktural
Kabupaten Lombok Timur	14.39	84.00	16.00	PAD bertumbuh, transfer tetap tinggi
Kabupaten Lombok Utara	18.45	74.12	25.88	Perbaikan fiskal relatif
Kabupaten Sumbawa	10.29	88.99	11.01	Ketergantungan struktural
Kabupaten Sumbawa Barat	13.84	88.86	11.14	PAD bertumbuh, transfer tetap tinggi
Kota Bima	12.44	92.48	7.52	Ketergantungan struktural

Kota Mataram	16.06	67.08	32.92	Perbaikan fiskal relatif
--------------	-------	-------	-------	--------------------------

Sumber: Diolah dari LKPD kabupaten/kota NTB, 2012–2023.

Temuan penelitian ini mengafirmasi teori desentralisasi fiskal, tetapi sekaligus memberi koreksi penting terhadap cara membaca kemandirian daerah. Secara teoritis, desentralisasi fiskal diharapkan memperkuat akuntabilitas, responsivitas, dan kemampuan pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih dekat (Faguet, 2014). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD belum otomatis mengubah struktur pendapatan daerah apabila dominasi DBH, DAU, dan DAK masih kuat. Koefisien PAD growth sebesar -0,066 dengan p-value 0,001 memang menunjukkan bahwa peningkatan PAD berhubungan negatif dan signifikan dengan rasio ketergantungan transfer, tetapi besaran koefisien tersebut juga menegaskan bahwa pengaruh PAD terhadap penurunan ketergantungan berlangsung terbatas dan bertahap. Temuan ini sejalan dengan Lewis (2013) serta Lewis dan Smoke (2017), yang menunjukkan bahwa transfer antarpemerintahan tidak hanya menjadi sumber pembiayaan daerah, tetapi juga membentuk insentif dan perilaku fiskal pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia, Akita et al. (2021) juga menegaskan bahwa DAU berperan dalam pemerataan fiskal, tetapi disparitas fiskal antardaerah tetap tinggi, sehingga transfer belum otomatis menghasilkan kapasitas fiskal lokal yang kuat. Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah memperluas teori desentralisasi fiskal: PAD tetap penting sebagai indikator kapasitas lokal, tetapi kemandirian fiskal harus dibaca dari kemampuan PAD memperbesar perannya dalam struktur pendapatan, bukan semata dari laju pertumbuhannya.

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada perbedaan eksplisit antara pertumbuhan PAD secara nominal dan kemandirian fiskal secara struktural. Banyak daerah dapat mencatat pertumbuhan PAD tinggi karena basis awal yang rendah, perbaikan administrasi, penyesuaian tarif, atau peningkatan penerimaan tertentu; tetapi selama *PAD share* tetap kecil dan transfer masih dominan, kemandirian fiskal belum dapat diklaim secara kuat. Sintesis ini diperkuat oleh Mahi (2011), yang menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki PAD yang cukup signifikan untuk menopang belanja lokal, serta Ginting et al. (2019), yang menemukan bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah berbeda antar-kluster sehingga tidak dapat dibaca secara seragam. Mubarok et al. (2022) juga menemukan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Afrizal dan Khoirunurrofik (2022) memberi nuansa penting bahwa penguatan kewenangan pajak lokal, seperti PBB-P2, dapat meningkatkan PAD dan mengurangi gejala ketergantungan apabila dikelola dengan tepat. Pada titik ini, kontribusi praktis penelitian menjadi jelas: pemerintah daerah tidak cukup mengejar peningkatan PAD melalui intensifikasi pungutan, tetapi perlu memperluas basis ekonomi lokal,

memperbaiki data objek dan subjek pajak, memperkuat digitalisasi administrasi pendapatan, mengendalikan kebocoran penerimaan, serta memastikan belanja produktif benar-benar memperbesar kapasitas ekonomi masyarakat. Bagi pemerintah pusat, hasil ini memberi pesan bahwa transfer seharusnya tidak hanya menutup *fiscal gap*, tetapi juga dirancang sebagai instrumen transisi menuju kemandirian fiskal yang sehat, adil, dan manusiawi—yakni kemandirian yang tidak membebani warga, tetapi memperkuat daya hidup ekonomi daerah (Sandjaja, F. R., Nafisa, F., S Manurung, I. N. 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa PAD kabupaten/kota di NTB selama 2012–2023 bertumbuh relatif tinggi dengan CAGR rata-rata 13.70%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding DAU yang hanya 3.36%, tetapi masih berada di bawah DAK yang mencapai 17.20%. Pola ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas pendapatan lokal, tetapi pada saat yang sama transfer, terutama DAK dan DAU, tetap menjadi komponen penting dalam struktur fiskal daerah. Pertumbuhan PAD belum sepenuhnya mampu menurunkan ketergantungan transfer secara struktural. Pada 2023, PAD agregat hanya menyumbang 16.4% terhadap total PAD, DBH, DAU, dan DAK, sedangkan transfer mencapai 83.6%. Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara menunjukkan perbaikan fiskal relatif, tetapi keduanya tetap bergantung pada transfer. Daerah lain, terutama yang PAD share-nya rendah, menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD dari basis kecil belum cukup untuk menggeser dominasi transfer. Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa kemandirian fiskal daerah tidak dapat disimpulkan hanya dari pertumbuhan PAD. Evaluasi yang lebih akurat harus membandingkan pertumbuhan PAD dengan perubahan PAD share dan rasio ketergantungan transfer. Dengan kata lain, pertumbuhan PAD baru memiliki makna struktural apabila mampu memperbesar proporsi PAD dalam total pendapatan utama daerah dan secara bertahap menurunkan dominasi transfer. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis empat komponen pendapatan, yaitu PAD, DBH, DAU, dan DAK, serta belum memasukkan variabel ekonomi daerah seperti PDRB, kemiskinan, jumlah penduduk, kapasitas administrasi pajak, dan kualitas belanja. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model ekonometrik yang lebih kuat dengan memasukkan variabel kontrol tersebut dan menilai apakah peningkatan PAD berpengaruh pada kualitas belanja serta outcome layanan publik.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Universitas Islam Al Azhar** yang telah memberikan dukungan pendanaan dan/atau fasilitasi dalam pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini didanai oleh Dana Penelitian yang disediakan oleh **Universitas Islam Al Azhar**. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu penyediaan data, proses pengolahan informasi, serta diskusi akademik yang memperkaya arah analisis penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada dua peninjau anonim atas masukan, kritik, dan saran berharga yang telah membantu memperbaiki kualitas naskah ini.

REFERENSI

- Afrizal, R. M., S Khoirunurrofik, K. (2022). Examining flypaper effect in Indonesia: Evidence after transferring urban-rural land and building tax to locals government. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 465–478. doi:10.21787/jbp.14.2022.465-478
- Akita, T., Riadi, A. A., S Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy & Practice*, 13(6), 1842–1865.
- Andriani, R. N. R., S Wahid, N. N. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah: Studi kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2006–2015. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., S Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1). doi:10.21580/jiafr.2019.1.1.3745
- Fadli, F. (2016). Fiscal decentralization and regional disparity in East and West Indonesia's provinces. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 1–17.
- Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13.
- Fathurrahman. (2023). Strategi penyerapan anggaran yang partisipatif dan kolaboratif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(2).
- Fathurrahman, dkk. (2023). Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, 9(2).
- Fatoni, A. (2020). Fiscal decentralization dilemma in Indonesia: Between corruption accountability and probability at local levels. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 101–110.
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., S Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105–127. doi:10.33105/itrev.v4i2.126
- Kusumadewi, D. A., S Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(1), 67–80.
- Lewis, B. D. (2013). Local government capital spending in Indonesia: Impact of intergovernmental fiscal transfers. *Public Budgeting & Finance*, 33(1), 76–94.
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28.
- Lewis, B. D., & Smoke, P. (2017). Intergovernmental fiscal transfers and local incentives and responses: The case of Indonesia. *Fiscal Studies*, 38(1), 111–139.
- Mahi, B. R. (2011). Local own revenue mobilization in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 26(1).
- Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., S Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: The effects of capital expenditure and intergovernmental

- revenue: The case of South Sumatra Province, Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 9(6), 503–512. doi:10.22437/ppd.v9i6.11364
- Nurhayati, Kusumastuti, S. Y., Hidayatullah, N., S Suparyati, A. (2022). Determinasi tingkat kemandirian fiskal 62 kabupaten tertinggal di Indonesia. *Media Ekonomi*, 30(2), 241–250. doi:10.25105/me.v30i2.14986
- Qibthiyyah, R. M. (2017). Provinces and local government revenues structures and intra-province economic disparity. *Economics and Finance in Indonesia*, 63(1), 81–96.
- Sandjaja, F. R., Nafisa, F., S Manurung, I. N. (2020). The impact of fiscal decentralization on welfare in selected provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 21–31. doi:10.21787/jbp.12.2020.21-31